

## Pola Hubungan Nelayan, Pemilik Kapal, dan Tengkulak Sebagai Kemiskinan di Dusun Pasar Gompong

Fajar Pebrilian Of Sayeda<sup>1</sup>, Dessy Mardhiah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [desy\\_padang@yahoo.com](mailto:desy_padang@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini menjelaskan pola hubungan nelayan, pemilik kapal, dan tengkulak sebagai kemiskinan di Dusun Pasar Gompong. Penelitian ini penting untuk diteliti karena memiliki potensi kelautan cukup besar, namun belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah teori ketergantungan oleh Andre Gunder Frank. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus, yakni, melihat fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan memakai teknik *purposive* dengan jumlah informan 15 orang, dengan kriteria nelayan tradisional aktif, tengkulak atau pemodal lokal yang berperan dalam distribusi hasil tangkapan, tokoh masyarakat atau pemuka adat yang memahami struktur sosial dan sejarah ekonomi desa, perangkat desa atau aparat pemerintahan lokal yang mengetahui kebijakan dan program terkait kesejahteraan masyarakat pesisir. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan pola hubungan sebagai penyebab kemiskinan tersebut ialah: 1) Penyedia hasil tangkapan dan penjualan eksklusif, 2) Ikatan rantai hutang, 3) Ketergantungan hidup dengan resiko yang tidak setara. Pola hubungan ini disebut pola hubungan sosial antara dua pihak atau lebih yang tidak setara.

**Kata Kunci:** Ketergantungan; Masyarakat miskin; Pola hubungan nelayan.

### Abstract

This study explains the relationship patterns between fishermen, boat owners, and middlemen as a cause of poverty in Pasar Gompong Hamlet. This research is important to examine because it has quite large marine potential, but has not been able to provide adequate welfare for the majority of its residents who make a living as fishermen. The theory used for analysis is the dependency theory by Andre Gunder Frank. The research method is qualitative with a case study type, namely, looking at the phenomenon in depth. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The selection of informants uses a purposive technique with a total of 15 informants, with the criteria being active traditional fishermen, middlemen or local financiers who play a role in the distribution of catches, community leaders or traditional leaders who understand the social structure and economic history of the village, village officials or local government officials who are aware of policies and programs related to the welfare of coastal communities. The data analysis technique uses Miles and Huberman's interactive analysis with data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study found that the relationship patterns as causes of poverty are: 1) Providers of catches and exclusive sales, 2) Debt chain ties, 3) Dependence on life with unequal risks. This relationship pattern is called a social relationship pattern between two or more unequal parties.

**Keywords:** Dependency; Poor communities; Relationship patterns between fishermen,

**How to Cite:** Syaeda, F.P.O. & Mardhiah, D. (2026). Pola Hubungan Nelayan, Pemilik Kapal, dan Tengkulak Sebagai Kemiskinan di Dusun Pasar Gompong. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(3), 585-595.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

---

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang hingga kini menjadi tantangan global, terutama di negara-negara berkembang. Sekitar 9,2% populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, yang ditandai dengan pendapatan di bawah USD 2,15 per hari (Nugraha et al., 2025). Kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pekerjaan layak (Sholistiyawati, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak semata-mata hasil dari kurangnya pendapatan, melainkan juga hasil dari eksklusi sosial dan kegagalan sistem dalam menyediakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan (Ritonga et al., 2023). Meski data nasional menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir, kenyataannya ketimpangan kesejahteraan masih sangat nyata, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik dasar (Manurung et al., 2025).

Wilayah pesisir menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap persoalan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa, dan sekitar 12,22% dari masyarakat miskin tersebut tinggal di kawasan pesisir (BPS, 2023). Dengan indikator ketergantungan pada satu sumber mata pencaharian, tidak memiliki aset produktif, terjerat utang, dll. Wilayah pesisir sering kali menghadapi tantangan ganda, yakni kerentanan ekologis serta keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Salah satu kelompok yang paling terdampak di wilayah ini adalah nelayan, yang kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam dan keberlanjutan sumber daya laut (Amanatin et al., 2024). Kemiskinan yang dialami oleh nelayan bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya produktivitas atau lemahnya etos kerja, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Mereka kerap mengalami keterbatasan dalam akses terhadap modal, teknologi, pasar, serta perlindungan hukum atas wilayah tangkap dan hasil laut mereka. Kondisi ini diperburuk dengan ketergantungan terhadap tengkulak dan fluktuasi harga ikan yang tidak menentu (Apriliana et al., 2024). Marsitadewi dan Sudemen (2024) menyebut kondisi ini sebagai kemiskinan struktural, yakni situasi di mana sistem sosial, ekonomi, dan politik secara sistematis meminggirkan kelompok tertentu sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap akar-akar struktural dari kemiskinan itu sendiri, termasuk dinamika kekuasaan, kebijakan tata ruang, akses terhadap sumber daya alam, serta relasi sosial-ekonomi yang membelenggu mereka (Goso & Anwar, 2017). Ketergantungan terhadap tengkulak, minimnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta lemahnya posisi tawar nelayan merupakan realitas yang mencerminkan keterpinggiran struktural mereka dalam sistem ekonomi nasional (Nuris, 2024). Situasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses panjang marginalisasi yang dialami oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan (Manurung et al., 2025). Dalam banyak kasus, nelayan tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan harga hasil tangkapan mereka sendiri, mereka bergantung pada tengkulak yang menguasai rantai distribusi dan akses pasar (Wijaya & Fauzie, 2020). Dalam konteks ini, kemiskinan tersebut merupakan produk dari ketimpangan relasi kuasa dan ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya serta perumusan kebijakan (Ritonga et al., 2023). Ketimpangan ini juga tercermin dalam minimnya partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan masa depan mereka sendiri (Wijaya & Fauzie, 2020). Salah satu wilayah yang secara nyata mencerminkan fenomena ini adalah Dusun Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah nelayan Kecamatan Lengayang tahun 2022 yaitu sebesar 2.043 orang. Lebih lanjut, jumlah nelayan yang berasal dari Dusun Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat berjumlah 257 orang (BPS, 2022). Dengan jumlah nelayan yang banyak, desa ini merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan cukup besar, termasuk sumber daya ikan dan hasil laut lainnya yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat (Risky & Yuspadianto, 2021). Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Berdasarkan data Podes 2021, Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 nagari dengan jumlah rumah tangga miskin mencapai 1.674 rumah tangga. Sementara itu, data terbaru Podes 2023 belum dirilis, sehingga acuan yang tersedia saat ini adalah angka tahun 2021. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 6,63% pada 2023. Meskipun nelayan tersebut tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya laut, kehidupan ekonomi nelayan masih jauh dari kata sejahtera (Sholistiyawati, 2025). Pendapatan yang tidak menentu akibat faktor cuaca, musim, serta harga jual yang ditentukan oleh tengkulak, membuat nelayan berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh (Muttaqin & Ismail, 2023). Minimnya akses terhadap sarana produksi perikanan, seperti perahu

bermotor, alat tangkap modern, dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, juga menunjukkan adanya hambatan struktural yang menghambat produktivitas nelayan (Nugraha et al., 2025). Dengan melihat kondisi ini, menjadi jelas bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan di Dusun Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat bukanlah permasalahan individual, tetapi merupakan hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang.

Dalam struktur sosial dan ekonomi komunitas ini, mayoritas nelayan tidak memiliki kapal sendiri dan hanya berperan sebagai buruh nelayan yang bekerja kepada pemilik kapal atau pemodal (Listyawati, 2021), dengan sistem pembagian hasil tangkapan ikan yang telah dijual dilakukan melalui skema tiga pihak, yakni untuk pemilik kapal sebagai pengelola utama usaha penangkapan, untuk keperluan operasional dan perawatan sarana produksi seperti kapal dan jaring, serta untuk buruh nelayan sebagai kompensasi atas tenaga yang dikerahkan, bahkan dalam situasi di mana hasil tangkapan tidak mencapai target atau mengalami kerugian. Dari total 12 responden yang berhasil dihimpun, terdapat dua orang pemilik kapal, yaitu Edi (58 tahun) dan Kambuik (56 tahun), yang keduanya berjenis kelamin laki-laki dan berusia di atas 50 tahun. Sementara itu, terdapat 10 orang lainnya yang bekerja sebagai buruh nelayan, terdiri dari enam laki-laki dan empat perempuan.

Penelitian tentang kemiskinan pada masyarakat nelayan sudah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Kemiskinan yang terjadi merupakan kemiskinan structural (Anwar & Wahyuni, 2019). Kemiskinan yang terjadi pada kelompok masyarakat nelayan adalah kemiskinan absolut yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Silooy 2017). Minimnya perhatian pemerintah daerah juga penyebab hal ini terjadi (Hermawan 2024). Nelayan yang tidak memiliki kapal atau perahu juga merupakan penyebab dari persoalan ini (Suryaningsi, 2017). keterbatasan sumber daya mengakibatkan pendapatan nelayan tidak menjadi menentu (Suleman et al., 2019). Faktor internal seperti adanya keterbatasan dibidang pendidikan, kurangnya sarana teknologi, dan keterbatasan modal juga merupakan awal kemiskinan masyarakat nelayan. Faktor eksternal termasuk kepada mekanisme pasar, posisi tawar tengkulak (Nawir et al., 2024). Ketika masyarakat nelayan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka akan meminjam (Nur et al., 2022). Perubahan iklim berdampak pada nelayan yang pergi melaut (Ulfa 2018). Kemiskinan ini cenderung akan terus berulang sebagai sebuah siklus (Wijaya & Fauzie 2020). Namun perbedaan mendasar terkait kemiskinan masyarakat nelayan ini ialah pada objek yakni melihat pola hubungan yang terjalin dan lokasi penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara mendalam dinamika kemiskinan nelayan di wilayah pesisir, dengan fokus pada masyarakat Dusun Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat, Lengayang, guna memahami akar persoalan kemiskinan yang berbasis pada ketidakadilan struktural. Maka adapun fokus penelitian ini pada Pola Hubungan antara Nelayan, Pemilik Kapal, dan Tengkulak sebagai Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Dusun Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan).

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, yakni, melihat fenomena secara mendalam (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan di Dusun Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebab Dusun Pasar Gompong memiliki potensi kelautan cukup besar, termasuk sumber daya ikan dan hasil laut lainnya yang menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive* yaitu suatu teknik yang mana sampel dipilih secara tidak acak dan menguasai suatu bidang tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun kriteria informan nelayan tradisional aktif, terutama yang telah bekerja sebagai nelayan lebih dari lima tahun, keluarga nelayan (terutama istri atau anak dewasa) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, tengkulak atau pemodal lokal yang berperan dalam distribusi hasil tangkapan, tokoh masyarakat atau pemuka adat yang memahami struktur sosial dan sejarah ekonomi desa, perangkat desa atau aparat pemerintahan lokal yang mengetahui kebijakan dan program terkait kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengambilan data mengalami kejenuhan ketika informan mencapai 15 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dilakukan untuk memahami pola hubungan antara nelayan, pemilik kapal, dan tengkulak di Dusun Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Observasi difokuskan pada kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat nelayan, sarana prasarana melaut,

aktivitas kerja nelayan, peran pemilik kapal dalam pengelolaan modal dan armada, serta pola transaksi antara nelayan dan tengkulak. Selain itu, observasi juga mengidentifikasi peran aktor utama, yaitu nelayan, pemilik kapal, tengkulak, dan keluarga nelayan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Wawancara dilakukan kepada nelayan, pemilik kapal, tengkulak, dan keluarga nelayan untuk menggali sistem kerja dan bagi hasil, mekanisme hubungan dengan tengkulak, serta tingkat ketergantungan ekonomi nelayan. Wawancara juga menyoroti dampak sosial ekonomi terhadap kesejahteraan keluarga nelayan dan menggali alternatif solusi serta harapan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan studi dokumen (Creswell, 2019). *Pertama*, melalui observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat untuk mengamati aktivitas sehari-hari nelayan. Keterlibatan peneliti secara langsung dapat memuat wawancara secara bersamaan. *Kedua*, wawancara mendalam, wawancara dilakukan secara fleksibel dan terbuka agar informan bebas mengungkapkan narasi personal dan sosial mereka. *Ketiga*, studi dokumen adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengabadikan proses pengumpulan data terkait penelitian yang dilakukan (Creswell, 2019). Adapun dokumentasi yang didapati yaitu arsip desa, laporan pembangunan, data kemiskinan lokal, catatan hasil tangkapan nelayan, serta dokumentasi visual seperti foto kegiatan masyarakat pesisir. Selanjutnya triangulasi data merupakan teknik menggabungkan data dari berbagai sumber, teknik, atau waktu. Dalam hal ini, peneliti menggabungkan berbagai sumber referensi, dengan teknik kualitatif melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengelaborasi dengan waktu penelitian. Tujuan utamanya untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang dikumpulkan. Setelah data diperoleh dilakukan analisis dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui analisis yang terdiri dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang telah disesuaikan dengan pedoman penelitian. Reduksi data, dengan melibatkan catatan atas data dan kemudian mengumpulkannya berdasarkan kategori-kategori data. Penyajian data, menyatukan informasi dengan cara yang konsisten dan mudah diakses. Dan terakhir kesimpulan (Miles & Huberman, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan dari pola hubungan antara nelayan, pemilik kapal, dan tengkulak sebagai penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan Dusun Pasar Gompong. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui pola hubungan tersebut, peneliti melihat dari aspek tengkulak, pemilik kapal, buruh nelayan, dan tokoh masyarakat seperti wali nagari, serta masyarakat yang terlibat dalam pola hubungan tersebut. Adapun pola hubungan yang terjalin antara tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan yang terlihat jelas ialah penyedia hasil tangkapan dan penjualan eksklusif, ikatan rantai hutang, dan ketergantungan hidup dengan resiko yang tidak setara.

### Penyedia Hasil Tangkapan dan Penjualan Eksklusif

Dalam pola kerja pemilik kapal dan buruh nelayan tentu pembagian hasil tangkapan akan dikeluarkan. Hasil ini dibagi secara 70% untuk pemilik kapal dan 30% untuk buruh nelayan. Namun 70% tersebut sudah merangkap kepada biaya operasional. Hasil ini dibagi setelah dilakukannya transaksi penjualan ikan kepada tengkulak. Dalam sistem penjualan ini tengkulak lah yang menentukan harga ikan. Terkadang tengkulak bisa memberikan harga ikan yang sangat tidak masuk akal dan sangat rendah. Cara tengkulak menentukan harga ikan dengan cara melakukan kordinasi dengan penampung kenalan tengkulak di luar daerah apakah stok ikan sedang banyak atau sedikit. Jumlah ikan dan cuaca sangat mempengaruhi harga jual beli ikan yang di lakukan oleh tengkulak. Jika hasil yang didapati pemilik kapal dan buruh nelayan tidak cukup untuk di jual maka pemilik kapal dan buruh nelayan membagi ikan tersebut untuk di konsumsinya. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Kambuik (56 tahun) salah satu pemilik kapal Dusun Pasar Gompong mengenai system hasil mencari ikan, mengungkapkan bahwa:

“....bapak sebagai yang punya kapal membagi hasil dengan 70% untuk bapak, dan 30% untuk buruh nelayan. Ini 70% karena didalam itu ada biaya operasionalnya. Oleh karena itu bapak cuman berani kasih 30% sama buruh nelayan. Kadang tengkulak kasih harga jualnya ga masuk akal. Kalau sudah seperti itu sama-sama merugi lah kami. Ya mau gimana lagi kan. Terus yang kasih harga buat jual ikan ni tengkulak, soalnya tengkulak yang tau tempat ikan-ikan ini mau dipasarkan, soalnya mereka yang banyak kenalan diluar. Kadang ikan ini kami makan saja kalo harga jual rendah sekali.” (wawancara tanggal 20 Oktober 2025).

Akibat harga jual yang tidak menentu oleh tengkulak dan pembagian hasil yang tidak merata mengakibatkan kestabilan ekonomi buruh nelayan menjadi tidak baik. Namun ada kalanya jika hasil tangkapan ikan melimpah, maka dari situlah keuntungan diraih oleh buruh nelayan. Sistem 30% yang tidak menguntungkan terhadap buruh nelayan, disisi lain nelayan tidak bisa berbuat apa dikarenakan lapangan

pekerjaan yang tidak ada selain mencari ikan didaerah Dusun Pasar Gompong. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Sisam (52 tahun) salah seorang buruh nelayan, mengungkapkan bahwa:

“...dengan 30% buat kami ini terkadang ga ada untung nya, dapat untung kalau hasil tangkapan ikan banyak. Kalau ga untung ya untuk beli beras aja susah. Hidup sekarang serba susah. Mau cari kerja yang lain ga tau mau kerja apa. Karna orang pesisir ya taunya melaut. Kalau bapak pikir ini akibat pendidikan rendah juga, jadi ga tau apa-apa selain cari ikan. Kegiatan kayak gini udah susah di ubah, kayak sudah jadi budaya kita aja, jadi ya gatau bapak mau berbuat apa lagi.” (wawancara tanggal 20 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sistem pembagian hasil ini sudah menjadi ketetapan antara pemilik kapal dan buruh nelayan setelah penjualan dilakukan kepada tengkulak. Penetapan harga jual juga tidak dapat dipastikan karena tengkulak penentu harga pasar sesuai dengan keinginan dan harga pasar yang menurut mereka cocok. Sulit untuk merubah sistem tersebut dalam relasi ini. Observasi penulis lakukan menampilkan adanya kesulitan ekonomi yang merata terjadi pada para buruh nelayan di Dusun Pasar Gompong. Pola hubungan ini saling bergantung namun terjalin secara tidak seimbang.

Harga ikan yang ditetapkan tengkulak ketika harga ikan naik itu tidak ada artinya untuk para buruh nelayan karena harga hasil tangkapan tetap akan dibeli dengan harga normal tanpa adanya kenaikan nilai harga pada hasil tangkapan ikan, akan tetapi ketika harga ikan turun harga ikan pun melonjak turun. Berdasarkan observasi harga ikan yang di beli tengkulak saat stok di luar daerah kekurangan dan cuaca kurang baik 45.000-60.000 per kg. Harga ikan yang di beli tengkulak saat stok melimpah 20.000-35.000 per kg. Hal inilah bisa menyebabkan para buruh nelayan tidak bisa berkembang. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ranos (20 tahun) salah satu buruh nelayan Dusun Pasar Gompong, mengungkapkan:

“...percuma saja harga ikan mau naik atau turun, ketika naik tengkulak tetap seperti itu juga membeli kepada kami, tetap teraniaya kami. Apalagi ketika harga ikan turun tambah teraniaya kami para buruh nelayan disini. Sama sekali tidak ada untung. Dengan harga rendah kayak gitu kami bingung juga mau berbuat apa, kalau tidak melaut ga makan, kalau melaut ya begini lah, untungnya sangat sedikit, tapi paling tidak bisalah untuk makan kami. Sistem harga kayak gini ni masih ada sampai saat sekarang, otomatis kami semua ga ada yang berkembang, gini-gini aja hidup kami.” (wawancara tanggal 22 Oktober 2025).

Sistem ini tetap berlangsung hingga saat sekarang ini di Dusun Pasar Gompong. Hal ini tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada para buruh nelayan untuk berkembang dan merubah taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Sistem jual beli dengan penetapan harga yang ditentukan oleh tengkulak merugikan banyak nelayan kapal bagan. Sulit untuk merubah sistem tersebut dalam relasi ini, karena pemilik kapal dan buruh nelayan sangat bergantung terhadap tengkulak. Hal ini dikarenakan tidak adanya pilihan pekerjaan selain dari melaut, keterbatasan pendidikan dan pengalaman membuat masyarakat selalu berada di bawah tekanan oleh tengkulak sebagai pengendali harga ikan. Oleh karena itu akibat pembagian hasil yang tidak merata dan ketergantungan masyarakat nelayan, mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat nelayan di daerah Dusun Pasar Gompong.

### **Ikatan Rantai Hutang**

Peminjaman merupakan kegiatan meminjam sesuatu yang dimiliki orang lain untuk digunakan dalam waktu tertentu, dengan syarat harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Peminjaman kepada tengkulak terjadi atas dasar faktor ekonomi. Hal tersebut menjadi alasan utama para nelayan melakukan peminjaman kepada tengkulak. Berdasarkan hasil wawancara salah satu pemilik kapal tradisional bapak isul (55 tahun), mengungkapkan:

“...yang paling kami takutkan kalau hasil kelaut tidak ada sama sekali. Kalau sudah seperti itu susah. Tidak tau mau ngapain. Ujung-ujungnya kami harus meminjam uang kepada tengkulak. Karena tengkulak yang punya uang. Guna kami meminjam untuk modal kelaut lagi. Kami minjam uang kayak gini ga selalu untung, kalau dipikir-pikir mungkin banyak buntungnya. Kadang kalau rugi kali kami bayar pake ikan aja lagi hutang-hutang ni, itu kalau minjamnya ke tengkulak, nanti mereka jual ikan kami dengan harga sesuai pasar.” (wawancara tanggal 22 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, jika peminjaman uang kepada tengkulak didasarkan akibat hasil tangkapan ikan yang sedikit maka menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal dan buruh nelayan serta modal awal untuk mencari ikan tidak terbayarkan kembali. Oleh sebab itu para pemilik kapal nekat untuk melakukan peminjaman kepada tengkulak sebagai modal dalam menangkap ikan kembali. Peminjaman

dilakukan, tidak selamanya akan meraih untung, kadang kala kerugian terjadi kembali kepada pemilik kapal maupun buruh nelayan. Hal tersebut tentu akan membuat pemilik kapal berhutang kepada tengkulak akibat tidak meraih keuntungan. Untuk melunasi hutang tersebut ditengah kesulitan ekonomi, para pemilik kapal maupun buruh nelayan akan membayar dengan hasil tangkapan mereka dengan cara diangsur. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Kambuik (56 tahun) salah satu pemilik kapal Dusun Pasar Gompong:

“...kadang pergi melaut ini ada untung dan ruginya. Ketika rugi kami tidak dapat apa-apa, sampai modal pun tidak balik. Karena itu kami terpaksa meminjam kepada tengkulak, karna tengkulak punya lumayan uang. Ketika pergi melaut dengan hasil pinjaman itu tidak dapat hasil, maka akan jadi hutang lagi. Jika kami tidak bisa mebayar dengan uang kami bayar sama hasil tangkapan. Seperti itu bisanya lagi. Selain ke tengkulak kami juga meminjam kepada bank, atau ga koperasi keliling, ya namanya juga ga ada duit pasti bakalan minjam.” (wawancara tanggal 28 Oktober 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, selain melakukan hutang kepada tengkulak, pemilik kapal maupun buruh nelayan juga berhutang kepada bank dan koperasi keliling, dengan jaminan surat kendaraan bermotor, surat tanah, dan surat rumah. Peminjaman ini menghasilkan bunga yang cukup besar jika pembayaran mengalami penunggakan. Hal yang dilakukan tengkulak jika pemilik kapal dan buruh nelayan tidak bisa membayar hutang yakni, mengambil jaminan yang diberikan kepada tengkulak, ikan tidak akan dibeli lagi atau lebih tepatnya diambil, tidak diberikan pinjaman untuk selanjutnya. Krisis ekonomi di daerah Dusun Pasar Gompong tetap tidak berubah. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Buyuang (38 tahun) salah satu buruh nelayan, mengungkapkan bahwa:

“...meminjam uang kadang sama bank atau koperasi, cuman yang paling banyak kita minjam di tengkulak. Kalau kita telat bayar hutang itu nanti ada bunganya. Terkadang bisa sampe besaran bunga dari pada utangnya. Tapi sebenarnya lebih baik minjam ke bank soalnya bunganya kecil kan, kalau ke koperasi agak besar dikit bunganya, tapi yang paling besar itu tengkulak. Kalau buruh nelayan paling banyak minjam ke koperasi, Karena pencairannya cepat Cuma pake ktp aja. Nah kalau yang banyak minjam ke tengkulak itu pemilik kapal biasanya. ” (wawancara tanggal 1 November 2025).

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti juga mendapat dokumen perbandingan tiga sumber utama para buruh nelayan melakukan peminjaman dan hutang. Berikut tabel dokumen pembandingan.

**Tabel 1. Data informan**

| Parameter               | Tengkulak (pemilik modal)              | Koperasi Keliling             | KUR BRI                                 |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bunga per hari</b>   | 5-10%                                  | 5-10%                         | 0,016-0,025%                            |
| <b>Bunga per bulan</b>  | 30-60%                                 | 20-50%                        | 0,5-0,75%                               |
| <b>Bunga per tahun</b>  | 1.000-3.000%+                          | 600-2.000%                    | 6-9%                                    |
| <b>Legalitas</b>        | Illegal (rentenir)                     | Semi-legal/ tidak diakui      | Legal, diawasi OJK                      |
| <b>Proses pencairan</b> | Instan (langsung)                      | Cepat (1-2 jam)               | 1-2 minggu                              |
| <b>Syarat</b>           | Tidak ada, janji lisan                 | Minim (KTP saja)              | Administrasi lengkap                    |
| <b>Jaminan</b>          | Alat tangkap/ ikan hasil panen         | Barang bergerak/ alat tangkap | Pola KUR (tanpa agunan fisik)           |
| <b>Dampak sosial</b>    | Eksplotatif, jerat hutang              | Masih eksploitatif            | Membangun usaha                         |
| <b>Nasabah</b>          | - 4 Pemilik kapal<br>- 3 buruh nelayan | - 112 buruh nelayan           | - 2 pemilik kapal<br>- 79 buruh nelayan |

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Kambang Barat

Tabel diatas menunjukkan banyaknya buruh nelayan yang melakukan peminjaman kepada koperasi keliling karena mereka sulit meminjam kepada tengkulak, sementara pemilik kapal cenderung meminjam uang kepada tengkulak dan KUR BRI karena mereka mempunyai jaminan. Masyarakat Dusun Pasar Gompong banyak yang melakukan peminjaman tersebut sebagai modal awal melaut. Mulai dari koperasi yang silih berganti menagih ke setiap rumah, hingga para buruh dan pemilik kapal yang meminjam langsung ke tengkulak. Hal tersebut sudah biasa terjadi di Dusun Pasar Gompong.

Peneliti juga mendapati temuan hasil obeservasi jika para pemilik kapal lebih sering meminjam kepada tengkulak dan KUR BRI dengan alasan pemilik kapal lebih sering berkomunikasi dan berhubungan secara langsung dengan tengkulak, dan alasan meminjam dengan KUR BRI dikarenakan bunga yang rendah. Sedangkan buruh nelayan lebih banyak meminjam kepada koperasi keliling dengan alasan proses pencairan yang cepat, dan juga KUR BRI dengan alasan bunga rendah dan tidak ada jaminan fisik. Kegiatan ini berjalan terus menerus sehingga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dusun Pasar Gompong.

Dampak yang terlihat jelas dari pola hubungan ini adalah rantai hutang piutang yang sampai sekarang masih tetap berjalan. Hal ini terjadi akibat pola hubungan yang tidak saling menguntungkan. Hutang piutang terjadi ketika modal untuk mencari ikan tidak tercukupi bahkan tidak ada sama sekali. Ini terjadi akibat harga rendah yang tengkulak berikan pada saat para pemilik kapal dan buruh nelayan menjual hasil tangkapannya. Tengkulak sebagai pihak dominan sangat meraih keuntungan dari sistem yang mereka jalankan saat transaksi jual beli ikan terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Nopi (47 tahun), mengungkapkan bahwa:

“...berhutang udah jadi kebiasaan, kami berhutang karena terpaksa. Ketika tidak dapat untung ya terpaksa berhutang. Awalnya emg sekedar meminjam uang saja tapi kalau tidak terbayarkan maka jadi hutang lah. Ga ada orang yang mau berhutang nak, tapi ya keadaan. Dan biasanya sasaran kami meminjam uang kepada tengkulak, karena dia yang banyak uang, selain itu ke KUR BRI, koperasi. Berhutang ini sudah menjadi kebiasaan sama masyarakat sini, yak arena itu tadi, pengetahuan kurang, modal ga ada, yang tau cuman cari ikan..” (wawancara tanggal 6 November 2025).

Ketika hutang tidak terbayarkan jumlah bunga tentu akan membengkak, yang mana ini menjadi dampak dari dominasi para tengkulak yang tidak masuk akal sebagai penampung ikan dan pemberi pinjaman di daerah Dusun Pasar Gompong. Tentu rantai kemiskinan akan terus berjalan di daerah tersebut akibat rantai hutang yang terjadi terus menerus.

#### **Ketergantungan Hidup Dengan Resiko Yang Tidak Setara**

Hasil laut adalah segala sesuatu yang diperoleh dari laut dan dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual. Ketika para nelayan tidak mencari ikan tentu mereka tidak akan mendapatkan sumber mata pencaharian. Maka secara tidak langsung para masyarakat nelayan sudah bergantung kepada hasil laut. Ketika hasil tangkapan banyak maka para nelayan akan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Namun, jika hasil tangkapan sedikit tentu pemenuhan pokok tidak akan terpenuhi. Ketergantungan akan terus terjadi jika lapangan pekerjaan masyarakat Dusun Pasar Gompong hanya berfokus menjadi nelayan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Buyuang (38 tahun), mengungkapkan bahwa:

“...sebenarnya jadi nelayan ini ada dampaknya, dampaknya yang jelas kami ketergantungan dengan hasil laut. Kalau ga dapat ya ga makan, kalau banyak hasil melaut bisa lah untuk makan, kalau tidak ya tidak habis pikir lagi. Pekerjaan orang disini ya cuman melaut, lapangan pekerjaan yang lain tidak ada. Apa yang mau dikerjakan selain melaut lagi, lapangan pekerjaan yang lain tidak ada. Dengan melaut lah kami bergantung hidup. Dan satu lagi pendidikan kurang disini. Rata-rata anak disini lebih memilih melaut dari pada sekolah, soalnya kata mereka kalau melaut dapat uang.” (wawancara tanggal 1 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara memang masyarakat nelayan Dusun Pasar Gompong sangat bergantung kepada hasil laut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang lain selain menjadi nelayan di daerah tersebut. Hal ini juga disebabkan kurangnya taraf pendidikan di daerah nelayan Dusun Pasar Gompong. Karena rata-rata anak di lingkungan tersebut lebih memilih pergi melaut dari pada sekolah dengan alasan ekonomi. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, maka hal tersebut disebut sebagai krisis kebutuhan pokok, hal ini terjadi karena adanya pemenuhan hidup yang tidak setara. Krisis ini terjadi akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini terjadi pada masyarakat Dusun Pasar Gompong. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama ibu sisam (52 tahun), mengungkapkan bahwa:

“...disini kan ada tingkatan, yang paling atas itu tengkulak, lalu pemilik kapal, dan terakhir kami para nelayan. Kami para nelayan bergantung kepada mereka, otomatis keuntungan yang didapatkan sedikit. Karena itulah kehidupan susah. Sampai-sampai untuk beli beras, minyak, cabe ga bisa dan biaya anak sekolah aja tidak bisa. Ini terjadi karena pengeluaran ga sama besar dengan pemasukan kami, pemasukan kecil sekali, manalah terpenuhi kebutuhan kami sekeluarga, ga tau juga solusi apa lagi yang mau dijalankan.” (wawancara tanggal 6 november 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan jika hal ini terjadi atas ketergantungan akibat pola hubungan tengkulak, pemilik kapal, buruh nelayan. Yang mana krisis utama terjadi pada lapisan bawah yaitu buruh nelayan. Sebab pada pola hubungan ini keuntungan yang paling sedikit terjadi pada buruh nelayan, sebagai pencari ikan, bahkan mereka bisa dikatakan tidak mendapat keuntungan dalam pola hubungan ini. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok para buruh nelayan yang bahkan tidak terpenuhi, sehingga ketergantungan hidup dengan resiko yang tidak setara terjadi di daerah ini.

### **Pembahasan**

Pembahasan kali ini mengenai bagaimana pola hubungan tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan sebagai penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan Dusun Pasar Gompong. Penelitian ini dibahas menggunakan teori Ketergantungan oleh Andre Gunder Frank. Teori ini membahas jika kemiskinan bukanlah akibat keterbatasan individu semata, melainkan produk dari relasi timpang antara kelompok dominan sebagai penguasa sumber daya dan kelompok subordinat yang lemah secara struktural. Serta hal ini terjadi akibat hubungan ekonomi dan politik yang tidak seimbang antara kelompok maju dengan kelompok tertinggal. Kelompok maju berperan sebagai pusat (metropolis) yang menguasai modal, teknologi, dan pasar, sedangkan kelompok tertinggal berada pada posisi pinggiran (satelit) yang bergantung pada kelompok maju (Frank, 1984). Hubungan yang bersifat eksploitatif ini menyebabkan aliran kekayaan mengalir ke negara maju, sehingga memperkuat kemajuan kelompok maju sekaligus mempertahankan keterbelakangan kelompok tertinggal.

### **Pola hubungan masyarakat maju dan masyarakat tertinggal**

Pola hubungan yang terjalin ialah tengkulak sebagai kelompok maju dan dominan dengan pemilik kapal dan buruh nelayan sebagai kelompok subordinat dan superordinate atau kelompok tertinggal. Dalam pola hubungan ini kemiskinan terjadi ketika pemilik kapal dan para buruh nelayan menggantungkan sumber kehidupannya seperti mata pencaharian kepada kelompok dominan yaitu tengkulak (Goso & anwar al., 2017). Adapun pola hubungan yang terjalin antara tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan dimulai dari pola kerja yang terdiri dari: 1) Penyedia hasil tangkapan dan penjualan eksklusif, untuk sistem penjualan ikan ditentukan oleh tengkulak, mulai dari harga pasar hingga target pasar. 2) Ikatan rantai hutang, hutang terjadi jika uang yang dipinjam tidak dapat dikembalikan, serta hutang dapat dilunasi melalui menyeter ikan kepada tengkulak. Hutang juga terjadi pada saat para buruh nelayan tidak memiliki modal untuk mencari ikan. 3) Ketergantungan hidup dengan resiko yang tidak setara, ini terjadi karena ketergantungan kepada hasil laut dan ketidakseimbangan kebutuhan hidup. Secara tidak langsung pola hubungan ini disebut sebagai ketimpangan antara berbagai pihak yang terlibat (Wijaya & Fauzie 2020).

Pola hubungan ini merupakan pola hubungan sosial antara dua pihak yang tidak setara, di mana satu pihak memiliki kekuasaan, pengaruh, atau sumber daya lebih besar, dan pihak lainnya bergantung atau membutuhkan bantuan (Nuris, 2024). Sistem hasil dan penjualan, serta peminjaman dan hutang termasuk kepada pola hubungan ini. Hal tersebut dikarenakan sistem hasil yang tidak adil yakni 30% untuk buruh nelayan dan 70% untuk pemilik kapal yang membuat buruh nelayan semakin tercekik. Sistem penjualan juga tidak masuk akal, harga yang diberikan oleh tengkulak sangat rendah, dikarenakan tengkulak memiliki tujuan mengambil keuntungan yang tinggi dari sistem penjualan ikan tersebut (Nawir et al., 2024). Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yang mana hal ini terjadi karena nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka dalam struktur sosial masyarakat pesisir (Ulfa, 2018).

Pola hubungan antara tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan merupakan hubungan sosial yang tidak setara, di mana tengkulak sebagai pihak dominan menguasai modal, sistem penjualan, dan penentuan harga (Tanjung, 2023). Ketergantungan melalui sistem hutang dan bagi hasil yang tidak adil (30% untuk buruh dan 70% untuk pemilik kapal) memperkuat kemiskinan struktural di masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang terus berlangsung karena nelayan belum memiliki lembaga ekonomi yang dapat dilindungi kepentingan mereka (Nurfadia et al., 2025).

### **Aspek ekonomi dan monopoli politik masyarakat nelayan**

Tengkulak memiliki kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya yang besar. Sehingga para buruh maupun pemilik kapal melakukan peminjaman kepada para tengkulak, koperasi keliling, dan KUR BRI saat keadaan ekonomi mereka krisis dan modal pergi kelaut tidak ada (Juliantono et al. 2016). Dibalik peminjaman tersebut tengkulak akan menjadikannya sebuah hutang dengan bunga, sehingga para pihak yang bergantung semakin tertindas (Nur, Wahyuni & Soimah, 2022). Kegiatan ini merupakan awal kehancuran perekonomian masyarakat nelayan. Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu oleh mengungkapkan jika hubungan ini pada akhirnya tidak seimbang dan merugikan pihak nelayan, hubungan ini terjadi karena adanya kebutuhan yang terdesak, yang mana disebabkan oleh keadaan ekonomi (Sa'diyah et al., 2022). Namun perbedaan terletak pada objek penelitian.

Aturan peminjaman yang dilakukan tengkulak kepada pemilik kapal dan buruh nelayan jika pembayaran tidak berjalan baik ialah dengan memberikan hasil tangkapan sebagai bayaran hutang kepada tengkulak (Marsitadewi et al., 2022). Sistem politik ini sangat merugikan pihak kelompok subordinat yaitu pemilik kapal dan buruh nelayan sebagai peminjam dana, karena tengkulak akan mengambil hasil tangkapan sebanyaknya dengan perhitungan yang rendah (Kinseng et al., 2023). Selain itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama tengkulak juga sangat mengeksploitasi kelompok tertinggal. Memberikan pinjaman dan monopoli pasar yang diberikan tengkulak juga merugikan kelompok subordinat. Harga jual ikan yang sangat rendah merupakan salah satu monopoli keuntungan yang dilakukan tengkulak (Mahayani, 2024). Monopoli tersebut tentu membuat kehidupan para kelompok tertinggal semakin tertindas. Hal ini sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pokok kelompok tertinggal Mulai dari kebutuhan pokok kehidupan yang tidak tercukupi, ketergantungan kepada hasil laut, peminjaman kepada koperasi dan KUR BRI (Feryl et al., 2021). Pola hubungan ini berhubungan dengan keadaan ekonomi kelompok tertinggal yaitu pemilik kapal dan buruh nelayan (Suleman et al., 2019).

Aspek ekonomi dan monopoli politik dalam masyarakat nelayan menunjukkan adanya dominasi tengkulak melalui penguasaan modal, sistem hutang berbunga, serta kontrol harga dan pasar (Hafidz & Musfiroh, 2022). Ketergantungan pemilik kapal dan buruh nelayan terhadap pinjaman, baik dari tengkulak maupun lembaga lain seperti koperasi dan KUR, memperkuat posisi tawar tengkulak dalam menentukan pembayaran hutang melalui hasil tangkapan dengan perhitungan yang merugikan nelayan. Praktik ini menciptakan eksploitasi ekonomi, monopoli keuntungan, serta memperburuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat nelayan, sehingga ketimpangan dan kemiskinan struktural terus berlanjut (Dwi et al., 2025).

#### **Ketergantungan sebagai penyebab kemiskinan**

Dalam teori Ketergantungan oleh Andre Gunder Frank akan ada istilah kelompok tertinggal dan kelompok maju (Fujiani et al., 2022). Istilah kelompok tertinggal ini disematkan pada fenomena dimana mereka ialah para pemilik kapal dan buruh nelayan yang memproduksi barang-barang primer dengan ketergantungan kelompok maju yang cenderung memiliki ilmu pengetahuan, modal, kekuasaan, serta teknologi maju yaitu tengkulak, sehingga dapat melakukan industrialisasi secara masif. Penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana kelompok tertinggal tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan kepentingannya yang disebabkan sistem pendidikan, pengetahuan, kekuasaan, ekonomi yang tidak baik. Dalam situasi ini, kelompok maju akan terus memaksakan kepentingan kepada kelompok tertinggal dan berujung pada eksploitasi kelompok maju terhadap kelompok tertinggal. Eksploitasi ini terjadi terus-menerus dan sudah membentuk struktur bagi mereka.

Pemilik kapal dan Buruh nelayan sebagai kelompok non dominan dan tertinggal tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan dalam menghentikan rantai kemiskinan di Dusun Pasar Gompong akibat eksploitasi yang dilakukan kelompok dominan dan maju yaitu tengkulak. Tengkulak menguasai target dan harga pasar, hingga relasi dalam penjualan ikan di Dusun Pasar Gompong. Hal inilah menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ini (Endang, 2022). Hal ini terus berlangsung hingga saat sekarang ini. Sehingga mengakibatkan kemiskinan secara struktural pada masyarakat nelayan di Dusun Pasar Gompong. Kemiskinan ini terjadi hingga sampai saat sekarang ini (Rusydi et al., 2021).

Kemiskinan yang dialami oleh pemilik kapal dan buruh nelayan di Dusun Pasar Gompong merupakan kemiskinan struktural yang disebabkan oleh relasi ketergantungan yang timpang (Kobesi et al., 2023). Dalam kerangka Teori Ketergantungan Andre Gunder Frank, kelompok nelayan bertindak sebagai kelompok tertinggal yang hanya mampu memproduksi barang primer, namun tidak memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan pengetahuan pasar. Ketergantungan ini dieksploitasi oleh kelompok maju (tengkulak) yang menguasai penentuan harga, target pasar, dan relasi dagang (Nurjaya et al., 2024). Akibatnya, nelayan tidak memiliki daya tawar dan terus terjebak dalam rantai kemiskinan yang sudah membentuk struktur dan berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini

#### **Kesimpulan**

Kemiskinan yang dialami oleh nelayan Dusun Gompong tidak bisa dipahami sebagai akibat dari kegagalan individu atau semata-mata karena rendahnya keterampilan. Tetapi, kemiskinan tersebut merupakan produk dari ketimpangan relasi kuasa dan ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya serta perumusan kebijakan. Hal ini juga merupakan ketergantungan antara kelompok maju (tengkulak) dengan kelompok tertinggal (pemilik kapal dan nelayan) dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi. Adapun pola hubungan yang terjalin ialah penyedia hasil tangkapan dan penjualan eksklusif, ikatan rantai hutang, dan ketergantungan hidup dengan resiko yang tidak setara. Dalam pola hubungan ini kemiskinan terjadi ketika para buruh nelayan dan pemilik kapal menggantungkan sumber kehidupannya seperti mata

pencabarian kepada kelompok dominan yaitu tengkulak. Dalam penelitian ini memperoleh dampak dari akibat pola hubungan antara tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan sebagai penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan Dusun Pasar Gompong. Dari temuan tersebut dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji persoalan dampak akibat pola hubungan yang terjadi, serta mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait pola hubungan antara tengkulak, pemilik kapal, dan buruh nelayan sebagai penyebab kemiskinan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, sehingga penelitian mendapat hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada data yang diperoleh sebagian besar berasal dari wawancara sehingga sangat bergantung pada jawaban informan yang bersifat subjektif, serta lingkup penelitian yang hanya terbatas pada wilayah Dusun Pasar Gompong sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke konteks masyarakat nelayan yang lebih luas. Oleh karena itu, saran yang dikemukakan peneliti diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi kemajuan sistem pendidikan dan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Amanatin, E. L., Sekarningrum, B., & Supangkat, B. (2024). Pembangunan Kemiskinan : Implementasi Falsafah Banteng Loreng Binoncengan dalam Relasi Patron-Klien Kelompok Nelayan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 418–433.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(4), 52–60.
- Apriliana, T., Fathonah, A. N., & Ali, M. (2024). Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 512–520. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1528>
- BPS. (2022). Jumlah Nelayan Perikanan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan (Orang). Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
- BPS. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Croswell, J. W. (2019). *Research Desagn: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Pustaka Pelajar.
- Dwi, K., Utami, S., & Fatoni, A. (2025). Peran Modal Sosial dalam Tindakan Interaksi Nelayan dengan Tengkulak Terhadap Keberlangsungan Kehidupan Nelayan. *Jurnal Pengabdian Inovasi Sosial Ekonomi*, 2(02), 13–19.
- Endang, R. (2022). Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural. *Perspektif*, XVI(3), 149–159.
- Feryl, I., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 21(01), 43–58. <https://doi.org/10.21009/plpb.211.05>
- Fitriani, F., Kinseng, R. A., Lubis, D. P., & Adhuri, D. S. (2023). Kemiskinan dan Strategi Penghidupan Nelayan Kecil di Tanjung Kait, Banten. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(1), 113–126.
- Frank, A. G. (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Sangkala Pulsar.
- Fujiani, M. (2022). Faktor Penyebab Kemiskinan Pada Nelayan Pesisir Pantai: Kajian Psikolinguistik. *Translation and Linguistics (Transling)*, 2(2), 82–85.
- Goso, G., & Anwar, S. M. (2017). Kemiskinan Nelayan Tradisional Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Kumuh. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.35906/jm001.v3i1.201>
- Goso, G., & Anwar, S. M. (2017). Kemiskinan nelayan tradisional serta dampaknya terhadap perkembangan kumuh. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(1).
- Hafidz, A., & Musfiroh, S. (2022). Strategi Bisnis Pengusaha Tengkulak Ikan Di Desa Dekatagung. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i2.223>
- Hermawan, Y. (2024). Ironi Kemiskinan Nelayan Di Destinasi Wisata Bahari. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.53691/jpi.v20i1.408>
- Juliantono, F. J., & Munandar, A. (2016). Fenomena kemiskinan nelayan: Perspektif teori Strukturasi. *Politik*, 12(2), 1857–1866.
- Kobesi, P. S., Falo, M., Tabenu, O., & Devita, W. B. (2023). Reproduksi Kemiskinan Nelayan Kecil di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus di Desa Oesoko, Kecamatan Insana Utara). *Agrimor*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.32938/ag.v8i1.1929>
- Listyawati, A. (2021). Strategi Nelayan Mempertahankan Kelangsungan Hidup Di Tengah Jerat Kemiskinan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 5(2), 163–175.
- Manurung, M., Rambe, M. I. I., Saragih, A. L., & Siregar, P. (2025). Konsep Upah Pekerja Nelayan di

- 
- Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Tanjung Balai. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(December 2024), 22–45.
- Marsitadewi, K. E., & Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i1.745>
- Marsitadewi, K. E., & Sudemen, I. W. (2024). Kemiskinan struktural di Karangasem: Menganalisis penyebab dan intervensi pemerintah. *Jurnal Good Governance*, 19-32.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Muttaqin, A., & Ismail, I. (2023). Kemiskinan Kultural Masyarakat Nelayan di Desa Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(2), 279–292. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i2.2815>
- Nawir, M., Juleha, J., & Suddin, W. (2024). Urgensi Pendidikan Nonformal dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kalangan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 18–25.
- Nugraha, G., Rahayu, D. S., & Sukarsol, A. (2025). Kemiskinan dan Partisipasi Tenaga Kerja: Tantangan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 1287–1303.
- Nur, A. A., Wahyuni, R. S., & Soimah, N. (2022). Karakteristik Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Programpenanggulangannya di Desa Tengku Dacing Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 986–1002.
- Nurfadia, N., Abdulahanaa, A., & S., A. (2025). Analisis Kemiskinan Struktural Nelayan Etnis Suku Bajo Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun. *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 42–60. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v5i1.10844>
- Nuris, N. D. (2024). Hubungan Patron-Klien dalam Membentuk Kemiskinan Nelayan. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6849–6855.
- Nurjaya, M. et al. (2024). Pusaran Kemiskinan Struktural di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 418-429.
- Risky, Y., & Yuspadianto, Y. (2021). Analisis Fasilitas dalam Rangka Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *E-Journal Universitas Bung Hatta*, April, 1–2.
- Ritonga, F. U., Suriadi, A., & Isworo, H. (2023). Analisis Pemetaan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2), 87–102. <https://doi.org/10.32734/ljss.v2i2.13491>
- Rusydi, B. U., Wahyudi, W., & Ulfa, M. (2021). Hubungan Patron-Klien Pada Komunitas Nelayan Dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.24256/alw.v6i1.2158>
- Sholistiyawati, A. (2025). Pengaruh Sistem Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia: Sebuah Literature Review. *JECTH: Journal Economy*, 3(1), 1–4.
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, 11(1), 79–84.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, A., Pratiknjo, M. H., & Sandiah, N. (2019). Kemiskinan Struktural dan Hubungan Patron Klien Nelayan Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Holistik*, 12(2), 1–20.
- Suryaningsi, T. (2017). Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Poverty of Fisherman Society In Aeng Batu-Batu Village Takalar District South Sulawesi. *Handep*, 1(1), 49–62.
- Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1073–1080. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.801>
- Ulfa, M. (2018). Persepsi Masyarakat Nelayan dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau dalam Aspek Sosial Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 23(1), 41–49. <https://doi.org/10.17977/um017v23i12018p041>
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 96-108.
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 02(02), 96–108. <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>
-